

Judul : Pembangunan IKN: Kontrol Harga Tanah Harus Terus Dilakukan
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembangunan IKN Kontrol Harga Tanah Harus Terus Dilakukan



Puteri Anetta Komarudin

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi. Pembangunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan, harus betul-betul terpantau dengan baik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan *master plan* dari hulu ke hilir.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Gedung DPR RI, Senayan,

Jakarta pada Kamis (3/2).

“Kebutuhan pendanaan IKN jangan sampai menambah beban APBN. Misalnya, pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” tegasnya.

Sekarang, kata politisi muda Partai Golkar itu, harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Itu sangat mahal. Kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya, *master plan* harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.

“Saya berharap Bappenas dapat memastikan *master plan* IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir,” saran Puteri.

Antarinstansi vertikal dan horizontal, sambung Puteri, juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan.

“Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah, terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,” tandas legislator dapil Jabar VII itu. ■ BSH